

**PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU PROVINSI  
BENGKULU**

Azka Fadhillah Khairunnisa  
NPP. 32.0248

*Asdaf Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu  
Program Studi Administrasi Pemerintahan*

*Daerah Email: 32.0248@ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Dr. M.Irwan Tahir, AP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of non-optimal waste management in Bengkulu City, which is characterized by limited infrastructure, low public awareness, and weak cross-sector coordination. Meanwhile, the collaborative governance approach is believed to be able to be a solution in dealing with the complexity of public governance problems, including in waste management. However, the implementation of this approach in the local context of Bengkulu City has not been studied in depth, especially in addressing the challenges of collaboration between the government, the community, and the private sector.

**Purpose :** This research aims to determine and analyze collaborative governance in waste management in Bengkulu City, to determine and analyze the inhibiting factors of collaborative governance in handling waste problems in Bengkulu City, to determine and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of collaborative governance in waste management in Bengkulu City, Bengkulu Province.**Methods :** The research method used is qualitative research with descriptive methods, data collection techniques taken are interviews, observation and documentation. Informants consisted of representatives of the government, community, and private sector. Data were analyzed using thematic analysis assisted by the NVIVO 14 application

**Result/Fidings :** The obstacles that occur in the field regarding the collaboration carried out to handle waste problems in Bengkulu City, Bengkulu Province are facilities and infrastructure such as waste transportation fleets, lack of public awareness about the importance of disposing of waste in its place. The theory used as an analysis knife in writing this thesis is to use the theory of collaborative governance from Ansel and Gash which explains that in collaborative governance seen from 4 aspects, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. **Conclusion :** Based on the results of the study, Collaborative Governance in waste management in Bengkulu City has been running well, but in the process there are still obstacles, namely the lack of budget, facilities and infrastructure and the government and the private sector have also made efforts to overcome these obstacles quite well.

**Keywords:** Collaboration, Waste Management, Stakeholder

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Bengkulu yang ditandai dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Sementara itu, pendekatan collaborative governance diyakini mampu menjadi solusi dalam menghadapi kompleksitas permasalahan tata kelola publik, termasuk dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasi pendekatan ini dalam konteks lokal Kota Bengkulu belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam menjawab tantangan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat *collaborative governance* dalam penanganan masalah sampah di Kota Bengkulu, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor penghambat *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

**Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang diambil adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan terdiri dari perwakilan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Data dianalisis menggunakan analisis tematik berbantuan aplikasi NVIVO 14

**Hasil/Temuan :** Hambatan yang terjadi dilapangan mengenai kolaborasi yang dilakukan untuk penanganan masalah sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu adalah fasilitas sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash yang menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* dilihat dari 4 aspek yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), dan *collaborative process* (proses kolaborasi).

**Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Collaborative Governance* Dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik namun pada prosesnya masih ditemui hambatan yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana dan pemerintah bersama pihak swasta juga telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cukup baik.

**Kata kunci :** Kolaborasi, Pengelolaan Sampah, Pemangku Kepentingan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan harus berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat melalui konsep collaborative governance. Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif (Ansell & Gash, 2008). Sebagaimana ditegaskan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), collaborative governance memfasilitasi

keterlibatan multiaktor melalui forum bersama yang memungkinkan pertukaran informasi, negosiasi, dan penciptaan nilai bersama dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas aktivitas perkotaan. Dalam konteks tata kelola daerah, pengelolaan sampah tidak semata-mata menjadi urusan teknis kebersihan, melainkan juga menjadi cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan serta keterlibatan aktif masyarakat. Kota Bengkulu, sebagai ibu kota provinsi yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023 Kota Bengkulu menghasilkan timbulan sampah sebesar 171.612,72 ton. Namun demikian, hanya sekitar 33,04% dari jumlah tersebut yang berhasil dikelola, sementara 66,96% lainnya belum tertangani secara memadai. Permasalahan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan infrastruktur pengangkutan dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, ditemukan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah meliputi keterbatasan jumlah kendaraan pengangkut, minimnya anggaran operasional, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Padahal, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur pembagian peran antara Dinas Lingkungan Hidup dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengelolaan sampah di ruang publik dan permukiman warga. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan collaborative governance menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan, sektor swasta sebagai penyedia sumber daya dan teknologi, serta masyarakat sebagai pelaksana dan pengawas di tingkat akar rumput. Valentina, Putera, dan Salsabila (2025) menyatakan bahwa collaborative governance merupakan suatu strategi yang mengutamakan pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif melalui pertukaran informasi, pemecahan masalah bersama, serta konsolidasi sumber daya untuk menghasilkan solusi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Selaras dengan itu, Purwanto dan Mutiarin (2022) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif pada isu lingkungan sangat dipengaruhi oleh adanya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan tujuan bersama di antara para aktor. Hal ini juga diperkuat oleh Bovaird dan Loeffler (2016) yang menyatakan bahwa “Effective collaborative governance depends heavily on the establishment of trust, mutual understanding, and shared goals among diverse stakeholders, which facilitates coordinated action and sustainable outcomes in urban environmental management.” Indikasi awal pelaksanaan pendekatan kolaboratif telah terlihat melalui berbagai inisiatif yang berkembang di Kota Bengkulu, antara lain Program SALIN (Sampah Jadi Linked) yang digagas oleh CV Limbah Berkah Sejahtera, pengembangan bank sampah di tingkat RT/RW, serta kampanye pemilahan sampah rumah tangga yang melibatkan komunitas lingkungan. Namun demikian, efektivitas dan keberlanjutan dari kolaborasi ini masih memerlukan evaluasi kritis. Saputra, Zuhdi, dan Setiawan (2025) menekankan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antarpihak, kepemimpinan fasilitatif dari pihak pemerintah, serta dukungan kebijakan yang memungkinkan interaksi yang produktif antaraktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Lebih lanjut, Meerkerk (2024) dalam penelitiannya mengenai tata kelola urban commons menegaskan bahwa konteks perkotaan membutuhkan pengaturan institusional yang dapat memfasilitasi kolaborasi

lintas batas antar sektor, organisasi, dan tingkat pemerintahan melalui proses deliberatif dan berbasis konsensus. Pendekatan ini mampu menjembatani perbedaan antara struktur pemerintahan yang cenderung hierarkis dengan dinamika komunitas masyarakat yang bersifat kompleks dan majemuk, serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, pembangunan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diwujudkan tidak hanya dalam tataran administratif, melainkan sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penanganan sampah di Kota Bengkulu masih jauh dari harapan pemerintah, terlihat dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tahun 2024 yang mencatat timbulan sampah mencapai 276,86 ton per hari atau sekitar 101.058,49 ton per tahun, dengan sumber sampah berasal dari berbagai aktivitas di kawasan pemukiman, komersial, fasilitas sosial, dan umum. Peningkatan jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 394.192 jiwa pada tahun 2024 turut mendorong kenaikan volume sampah, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Air Sebakul yang menjadi satu-satunya TPA di kota ini sudah terbatas dan hanya mampu menampung sekitar 57,91% dari total timbulan sampah harian. Keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menyebabkan sebagian besar sampah tidak tertangani secara optimal dan berpotensi menimbulkan TPS liar di berbagai lokasi. Sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan metode kumpul-angkut-buang belum mampu mengatasi masalah penumpukan sampah, sehingga diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, seperti pengembangan bank sampah, TPS3R, serta pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah, agar pengelolaan sampah di Kota Bengkulu menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Fadliah et al. (2021) meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* di Kota Makassar, dengan menekankan pentingnya komunikasi dan sumber daya sebagai faktor utama keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sinergi antar aktor seperti UPT Bank Sampah, Yayasan Peduli Negeri (YPN), dan Bank Sampah Universitas (BSU).

Penelitian kedua oleh Rahmawati dan Ilman (2023) menyoroti praktik *collaborative governance* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon, Kabupaten Sidoarjo, melalui penerapan prinsip 3R dan pelibatan organisasi informal. Penelitian ini menegaskan urgensi keterlibatan aktif masyarakat serta penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai bagian dari strategi

Penelitian Ketiga oleh Rahayu et al. (2024) mengkaji model *Pentahelix ABCMG+* dalam pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi, yang melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, media, pemerintah, dan teknologi digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-aktor secara simultan mampu mendorong efisiensi pengumpulan dan pemrosesan sampah.

Penelitian keempat oleh Penelitian oleh Anjani (2024) secara khusus meneliti *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi. Meskipun inisiatif kolaboratif telah ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terjalin hubungan sektoral yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Permasalahan utama ditemukan pada eksklusivitas masing-masing sektor serta perbedaan kapasitas sumber daya. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga menjadi penghambat

signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa *collaborative governance* dapat diterapkan, tetapi memerlukan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi tantangan yang ada.

Penelitian kelima oleh Agyemang, Amponsah, dan Agyemang (2024) mengkaji praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di kawasan informal Ghana. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan multipihak secara aktif mampu mengatasi hambatan infrastruktur dan meningkatkan koordinasi serta inovasi dalam pengelolaan sampah. *governance*.

Penelitian keenam oleh Chofifah (2022) mengkaji praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan telah berjalan, meskipun peran KSM masih terbatas pada pengangkutan sampah. Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Camat, KSM, Bank Sampah, pengepul sampah, dan masyarakat umum telah terjalin, namun implementasinya belum optimal dan memerlukan penguatan peran serta pemanfaatan KSM di tugas lain selain pengangkutan sampah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor pengambat Collaborative Governance Dalam pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

## **II. METODE**

Menurut Creswell (2014) dalam Sugiyono (2022:2) yang menyebutkan bahwa metode penelitian mencakup berbagai bentuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang dirancang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan harus memenuhi beberapa komponen penting, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Menurut Fernandes (2016:230), data penelitian dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap tujuh

informan kunci, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala Seksi Pengurangan Persampahan, pengelola sistem SALIN (Sampah Online), serta tiga perwakilan masyarakat aktif dalam pengelolaan sampah, selain itu juga melalui observasi dan dokumentasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup serta catatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara paralel dan sistematis untuk memastikan validitas dan kedalaman informasi. Data dianalisis secara induktif dan deskriptif menggunakan perangkat lunak Nvivo 14 untuk membantu proses koding, kategorisasi, dan visualisasi data, dengan pendekatan triangulasi guna meningkatkan kredibilitas temuan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang memfokuskan pada kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan sampah melalui kolaborasi multi-pihak.

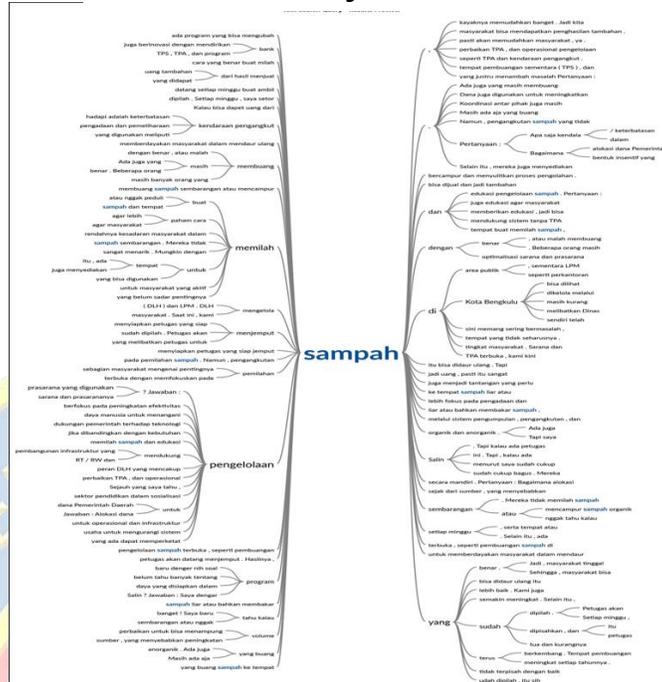
### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu menggunakan teori dari Ansel dan Gash (2008). Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur collaborative governance yaitu starting condition (kondisi awal), institusional design (desain institusional), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif), collaborative process (proses kolaborasi). Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

#### **3.1 Starting Condition (kondisi awal)**

Kondisi awal dalam teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash merupakan fondasi utama keberhasilan kolaborasi antar sektor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kondisi ini menjadi titik awal yang menentukan terbentuknya keputusan berorientasi konsensus untuk mengimplementasikan program publik. Terdapat tiga indikator penting dalam kondisi awal, yaitu ketidakseimbangan sumber daya dan kemampuan antar stakeholders, insentif kolaborasi, serta riwayat konflik yang pernah dialami. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk mengidentifikasi kata-kata kunci yang sering muncul dalam diskusi mengenai pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Berdasarkan analisis *Word Frequency Query*, diperoleh kata-kata yang paling sering muncul Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut:

## Text Search Query kondisi awal



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 14, 2025

Dalam penelitian pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, analisis menggunakan perangkat lunak NVivo 14 mengungkapkan beberapa tantangan utama. Infrastruktur dan fasilitas pendukung masih terbatas, dengan banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke tempat pembuangan sampah yang memadai serta kekurangan kendaraan pengangkut sampah. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik masih rendah, yang menyebabkan proses pengelolaan menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Selain permasalahan infrastruktur dan kesadaran, sistem insentif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat juga belum optimal. Beberapa responden menyatakan bahwa adanya penghargaan atau insentif bagi warga yang aktif dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem insentif menjadi kunci penting untuk memperbaiki pengelolaan sampah secara kolaboratif di Kota Bengkulu.

### 3.2 Institusional Design (desain institusional)

Perancangan institusional harus memperhatikan protokol dasar dan regulasi guna menjamin legitimasi prosedural serta efektivitas dalam proses kolaboratif. Pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan inklusif, sehingga setiap kelompok memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Desain ini memastikan adanya aturan yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, serta mekanisme koordinasi yang efektif dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam analisis NVIVO 14, data terkait konsep desain institusional diolah menggunakan fitur *Word Frequency Query*, dan diperoleh hasil sebagai berikut:





## Word Frequency Query proses kolaborasi

sampah	masyarakat	serta	pertemu	bersih	komitm	sekolah	telah	berka	diskus	masin	meng	semba	setiap	sistem	sosial	tentan		
		disepakati	pihak	digital	komun	sektor	tujuan	bertar	forum	media	menja	tugas	bert	berd	berk	berp	bias	
pengelolaan	lingkungan	mengelola	tingkat	evaluasi	mencip	swasta	utama	berup	hidup	memap	pemb	adany	dibuh	nant	kegi	kepe	kesak	ketig
	melalui	meningkat	berkelan	jawab	sehat	teknolo	balik	contol	elas	memt	platfor	aplika	dijaha	kom	kualif	kurat	langs	
							bentuk	dilaku	mana	memil	progra	berke	dilaju	kont	lanjut	melamela		
												benar	dinakeb	koo	mana	memame		

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 14, 2025

Dari hasil analisis Text Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk menganalisis kata-kata kunci yang sering muncul dalam diskusi mengenai kolaborasi pengelolaan sampah. Berdasarkan analisis Word Frequency Query, ditemukan kata-kata yang paling sering muncul dalam data yang dianalisis. Hasil ini memberikan gambaran tentang fokus utama dalam diskusi kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, yang dapat dilihat pada gambar yang disediakan oleh peneliti. Dari hasil analisis Text Search Query, tantangan utama dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu adalah kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta sistem insentif yang kurang optimal. Banyak kawasan belum memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai, sehingga masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kondisi kendaraan pengangkut sampah juga menghambat efektivitas pengelolaan. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik masih rendah, yang memperumit proses pengelolaan sampah secara keseluruhan.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kolaborasi yang ideal, yang ditandai dengan lemahnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti Anjani (2024), Chofifah (2022), dan Fadliah et al. (2021) yang sama-sama mengidentifikasi lemahnya kolaborasi lintas aktor dan keterbatasan sumber daya sebagai hambatan utama. Namun, berbeda dengan beberapa daerah lain seperti Bekasi dan Sidoarjo yang telah mengembangkan model kolaboratif formal seperti pendekatan pentahelix dan TPST, Kota Bengkulu belum memiliki kerangka kolaborasi yang terstruktur serta belum memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat dan dominasi peran Dinas Lingkungan Hidup tanpa dukungan kuat dari aktor lain juga menjadi pembeda yang memperlemah efektivitas program. Oleh karena itu, penguatan struktur kolaboratif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta integrasi peran swasta dan masyarakat menjadi langkah penting agar collaborative governance dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Bengkulu.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa collaborative governance dalam penanganan masalah sampah di Kota Bengkulu sudah ada dan berjalan, namun belum mencapai tujuan utama dan belum maksimal. Masih ditemukan kurangnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan personel pengelolaan sampah terutama dalam hal pengangkutan akibat kurangnya armada dan petugas kebersihan, serta masih banyaknya titik tempat pembuangan sampah ilegal. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah sampah juga belum optimal meskipun sudah ada beberapa bentuk kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta, dan masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat proses collaborative governance berasal dari aspek internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan keterlibatan pihak ketiga dalam penanganan sampah agar proses pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Bengkulu sebagai studi kasus, sesuai dengan pendekatan yang diambil berdasarkan teori Ansell dan Gash.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan di lokasi lain yang berkaitan dengan collaborative governance dalam penanganan masalah sampah di Kota Bengkulu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan komprehensif

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Bapak Wali Kota Bengkulu dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu beserta pihak terkait yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agyemang, E., Amponsah, O., & Agyemang, F. S. (2024). Collaborative governance practices in waste management in informal settlements in Ghana. *Waste Management & Research*, 42(3), 215–228. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2024.100150>
- Anjani, N. (2024). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 19(1), 77–89. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (Eds.). (2023). *Public Management and Governance* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003282839>
- Choffifah, N. (2022). Praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 145–160. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9716>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadliah, N., Sari, R. M., & Rahman, A. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis collaborative governance di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 123–134. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jppm/article/view/6284>

- Meerkerk, J. (2024). Understanding the governing of urban commons: Reflecting on five key features of collaborative governance in Zero Waste Lab, Amsterdam. *International Journal of the Commons*, 18(1), 397–410. <https://doi.org/10.5334/ijc.1282>
- Purwanto, E. A., & Mutiarin, D. (2022). Collaborative governance in environmental management: The role of trust, communication, and shared goals. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(1), <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9941267/>
- Rahmawati, D., & Ilman, M. (2023). Praktik collaborative governance di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 45–58. <https://www.mendeley.com/catalogue/c6a93bc5-b8a2-30d9-a2a2-e4ecacf487f3/>
- Rahayu, S., Pratama, F., & Dewi, R. (2024). Model Pentahelix ABCMG+ dalam pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 22(1), 88–101. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/6078>
- Saputra, T., Zuhdi, S., & Setiawan, I. (2025). Charting a greener future: Collaborative governance dynamics in Pekanbaru sustainable waste management. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(4), 1655–1663. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200427>
- Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Salsabila, L. (2025). Collaborative governance in handling the waste crisis: A systematic literature review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(2), 761–770. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200225>

